

Model Penguatan Dakwah dalam Persaingan Politik Islam di Malaysia

Hamdan Daulay

Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

hamdandly@yahoo.co.id

Abstract: *Mahathir Mohammad even succeeded in embracing Anwar Ibrahim as part of the government, while at that time Anwar was known as an important figure of ABIM known for the harsh criticisms towards the government. The presence of Anwar Ibrahim as a Muslim figure in the government circle made the policies of Islam politics more real and stronger, although Anwar Ibrahim was eventually dumped by Mahathir due to the dynamics of the politics happening in Malaysia. Irrespective of the political conflicts that occurred between Mahathir Mohammad and Anwar Ibrahim, it was undeniable that there were quite a number of policies benefitting the Muslims and Malay ethnic during this period. Among other benefits were the establishing of Islam banks, Islam insurance, International Islamic Universities, up to a huge support given by the royal family to propagate Islam from the scale of the village to a national one. Malaysia is actually a multi-ethnic and multi-faith society. The Malays only slightly outnumber half of the population, but they dominate the power of politics and culture. The rest are comprised of various ethnics such as Chinese and Indian. Islam and national identity together with the Malay politics have long been intertwined, mirrored in the common belief that a Malay must be a Muslim.*

Keywords: *Struggle, Da'wah, Politics, Malaysia*

A. Pendahuluan

Sejak awal kemerdekaan Malaysia hingga saat ini, dua kekuatan politik utama negara ini, UMNO (*United Malays National Organisation*) dan PAS (Partai Islam se Malaysia) mengalami persaingan sengit. Fokus persaingan kedua partai ini adalah dalam memperebutkan massa Melayu dengan isu keislaman.¹ Persaingannya banyak menjurus kepada kaedah dan bentuk Islam yang hendak dipaparkan kepada masyarakat. Kedua belah pihak mencoba meyakinkan rakyat bahwa perjuangan merekalah yang lebih

¹Pembahasan tentang politik UMNO dan PAS sudah banyak ditulis dalam berbagai referensi. Lihat, Zainah Anwar, *Kebangkitan Islam di Malaysia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), Mahathir Mohammad, *Interaction-Integration*, (Kuala Lumpur, Intisari, 2002), Khadijah Md Khid, *Politics in Malaysia: The Malaysia Dimension*, (London: Routledge, 2007).

benar. UMNO sendiri mengalami pergeseran strategi politik seiring dengan dinamika politik yang ada di Malaysia. Ketika UMNO berdiri tahun 1946, predikat sebagai partai sekuler begitu melekat dengan partai ini. Predikat sebagai partai sekuler yang melekat dengan UMNO tidak bisa lepas dari sejarah pembentukan partai ini, sebagai organisasi bangsa Melayu bersatu yang berjuang untuk Malaysia dengan realitas penduduk yang multi etnik dan multi agama. Sebagai partai yang direstui kolonial Inggris dan juga tokoh-tokoh UMNO banyak yang berlatar belakang pendidikan Barat, membuat citra partai sekuler semakin kuat bagi partai ini.

Citra UMNO sebagai partai sekuler semakin menonjol tatkala Dato' Musa Hitam menjadi timbalan Perdana Menteri. Kebijakan politik yang dibuat pemerintah waktu itu belum begitu kuat berpihak pada kepentingan umat Islam dan Melayu. Namun pergeseran politik UMNO terus muncul seiring dengan kuatnya tuntutan masyarakat Melayu dan Islam, sehingga UMNO yang dulunya dikenal sekuler bergeser menjadi partai yang banyak membuat kebijakan politik yang menguntungkan Islam. Kebijakan politik yang dibuat Mahathir Mohammad dan juga Abdullah Ahmad Badawi semakin Islami, sehingga membuat PAS yang selama ini mengusung isu Islam merasa tersaingi. UMNO lewat Abdullah Ahmad Badawi dengan cerdas membawa wacana Islam Hadhari yang moderat dan bisa diterima oleh sebagian besar umat Islam Malaysia.

Sepanjang tahun 1990-an perdebatan politik tentang Islam banyak menyentuh aspek nilai dan pelaksanaan Islam itu sendiri dan ia selaraskan pula dengan cita-cita Dr. Mahathir Mohammad untuk memodernkan masyarakat Malaysia melalui dasar perindustrian yang dikenalkan. Bagi Mahathir Mohammad, umat Islam harus banyak melakukan ijtihad untuk mengikuti kemajuan zaman. Kalau umat Islam ingin maju dalam semua aspek kehidupan, maka konsep Islam tradisional yang diusung PAS selama ini tidak relevan lagi. Untuk itu Islam harus menyesuaikan diri dengan kemodernan. Pendidikan umat Islam harus ditingkatkan dalam segala bidang, tidak hanya dalam ilmu keislaman, namun juga dalam bidang teknologi. Dengan cara demikianlah menurut Mahathir, umat Islam bisa mencapai kemajuan.

Semangat Dr. Mahathir Mohammad untuk mentransformasikan masyarakat dan ekonomi Malaysia telah dikritik hebat oleh PAS yang

dikatakan sebagai pengabaian pada pembangunan kerohanian dan agama masyarakat (Islam). Kepada masyarakat Muslim Malaysia, isu persaingan inilah yang menyebabkan partai-partai politik yang didominasi oleh kelompok Melayu Islam berusaha untuk membuat beberapa perjanjian dalam aksi politik. Terutama apabila berhadapan dengan Pilihan Raya Umum (PRU), sudah tentu isu Islam menjadi isu yang dominan.²

Sebagai Presiden UMNO waktu itu, Dr. Mahathir Mohammad menyeru anggota partai agar jangan mempersoalkan isu keanggotaan warga negara non-muslim di tubuh UMNO, karena konstitusi UMNO sendiri membenarkan penyertaan mereka. Dalam usaha mewujudkan dasar toleransi seperti itu, dalam perhimpunan Agung UMNO pada 10 November 1991, Mahathir mengubah kata “anak Melayu” dengan “rumpun Melayu” pada lirik lagu resmi UMNO yaitu “Bersatu, Bersetia, Berkhidmat” untuk menggambarkan komposisi warga negara non-muslim dan non-Melayu Sabah sebagai anggota UMNO juga.³

Sesudah kemerdekaan, corak nasionalisme konservatif lebih difokuskan ke arah pembinaan bangsa dan negara. Sebab itulah ada nasionalisme bahasa, nasionalisme ekonomi, dan sebagainya. Apapun corak perubahannya, namun terasnya tetap satu, yaitu kebangsaan Melayu sebagai ciri asasnya, sedangkan ciri lainnya, seperti agama, merupakan unsur-unsur sampingan belaka. Bahkan menurut Siddiq Fadil, nasionalisme Melayu hingga saat ini masih berselubung mega mendung yang tebal sehingga tidak jelas ciri keislamannya. Yang jelas, Islam hanya merupakan salah satu unsur nasionalisme Melayu di samping bahasa, adat istiadat, dan sebagainya.⁴

Kendati partai yang berkuasa (UMNO) dan para politisinya selalu peka terhadap Islam, pada tahun-tahun awalnya, UMNO cenderung menekankan perannya sebagai pembela nasionalisme Melayu dan sistem pluralitas. Namun, atmosfer berubah mendadak setelah 1969. Perlunya menanggapi tuntutan ekonomi dan budaya dari basis pendukung Melayu mendorong UMNO memberi tekanan lebih besar pada identitas dan

²Shaharuddin Badaruddin, *Demokrasi dan Proses Politik di Malaysia*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2008), h.6

³*ibid*, h. 106

⁴*ibid*, h. 158

solidaritas Melayu-Islam melalui simbol-simbol, wacana politik, dan kebijakan-kebijakannya. Ketika lingkungan politik dan sosial telah berubah akibat gelombang urbanisasi orang-orang Melayu ke wilayah perkotaan, tekanan yang semakin besar pada bahasa dan agama Melayu (Islam), aktivitas dan tuntutan dari PAS dan ABIM, serta munculnya generasi muda berorientasi Islam yang lebih militan, budaya elit politik pun berubah.⁵

B. Penguatan Politik Islam

Strategi politik Mahathir mampu secara cerdas menyatukan masa lampau dan masa kini, menahan dan mengkooptasi oposisi Islam, memanfaatkan Islam dalam politik domestik, regional dan internasional. Program Islamisasi pemerintah yang dipimpin UMNO berkisar dari menggunakan simbol-simbol dan retorika Islam hingga mendirikan lembaga-lembaga Islam. Para politisi UMNO menyamakan nilai-nilai Islam dengan kerja keras, disiplin, dan kemajuan, serta mengaitkan program-program NEP dengan Islam. UMNO telah mendesak perlunya mengembangkan masyarakat Muslim yang lebih modern dan kompetitif jika Islam ingin maju pesat di tengah dunia modern. Jika Islam ingin dipertahankan dan dikembangkan, kaum Muslim harus mampu bersaing dengan orang-orang Cina dan India.⁶

Sesungguhnya kebijakan politik yang memberi hak-hak istimewa bagi Melayu dan Islam menjadi dilema bagi pemerintah. Karena kebijakan politik tersebut akan menimbulkan kecemburuan bagi etnis non-Melayu dan warga negara Malaysia yang non-Muslim. Padahal dalam asas demokrasi yang berkeadilan, semua warga negara, apa pun etnis dan agamanya harus diberi perlakuan yang sama. Sementara di sisi lain, etnis Melayu yang juga identik dengan Islam telah memiliki akar sejarah yang panjang di negeri ini, sehingga wajar kalau mereka menuntut adanya hak-hak istimewa, baik menyangkut ekonomi, pendidikan, sosial dan kesejahteraan lainnya. Kalau hak-hak istimewa tidak diberikan kepada Melayu dan Islam, maka dalam persaingan terbuka dikhawatirkan nanti Melayu dan Islam kalah bersaing dengan etnis cina dan India. Itulah latar belakang yang menjadi alasan

⁵John L Esposito & John O Voll, *Demokrasi Negara-negara Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 182-183

⁶*Ibid*, h. 183

munculnya kebijakan politik yang memberi hak-hak istimewa kepada Melayu. Tujuannya jelas, agar Melayu dan Islam bisa sejajar dengan etnis lain dalam menikmati kesejahteraan, kemajuan dan kemodernan yang dicapai oleh kerajaan.⁷

Banyak cara dan langkah politik yang dilakukan UMNO dalam aktualisasi hak-hak istimewa Melayu dan Islam. Salah satu diantaranya dengan mengajak tokoh-tokoh Melayu dan Islam bergabung dengan UMNO, sehingga cita-cita perjuangan Islam bisa diaktualisasikan lewat kebijakan politik. Peristiwa paling penting dan tak terduga adalah ketika Mahathir mengajak Anwar Ibrahim untuk bergabung ke dalam pemerintahannya. Penerimaan Anwar mengejutkan dan mencengangkan banyak pihak. Sebagian orang menyatakan bahwa dia telah dipaksa, sebagian yang lain percaya bahwa dia telah memanfaatkan kesempatan untuk bekerja demi Islamisasi masyarakat yang lebih luas melalui pemerintah.

Pengunduran dirinya sebagai presiden ABIM pada 1982 merupakan awal kenaikan karir politiknya yang sangat cepat di panggung kekuasaan. Menghadapi kecemasan politisi UMNO yang terus menentanginya, basis dukungan Anwar Ibrahim yang luas di kalangan generasi muda, bahkan di dalam UMNO sendiri, semakin terlihat nyata dengan terpilihnya dia sebagai presiden Pemuda UMNO, dan menyusul kemudian wakil presiden UMNO. Banyak pihak meramalkan bahwa karier politik Anwar akan segera tamat, baik karena oposisi yang kuat dari hirarki politik UMNO itu sendiri maupun karena dia tidak akan siap memangku jabatan tinggi dalam pemerintahan. Anwar ternyata terus bergerak maju dengan menduduki beberapa posisi dalam kabinet, menteri pemuda, menteri olahraga dan kebudayaan, menteri pertanian, menteri pendidikan, dan akhirnya menjadi menteri keuangan dan wakil pendana menteri pada tahun 1993.⁸

Anwar Ibrahim sendiri harus menjembatani kesenjangan antara dua dunia, yaitu dunia aktivis Islam dan dunia politisi UMNO. Dia menghadapi kritik dan sinisme dari kalangan yang menilai dirinya telah terkooptasi oleh pemerintah. Banyak pihak yang belakangan mengecam tokoh oposisi yang dulu dipandang kharismatis dan bersuara lantang itu karena kini dia hanya

⁷Wawancara dengan Abdul Him, (Guru Besar University Malaya) di Kuala Lumpur, tanggal 24 Juli 2007.

⁸John L. esposito & John O. Voll, *Demokrasi...*, h. 184

menjadi politisi kebanyakan yang kompromis. Banyak pemimpin senior UMNO yang curiga kepada aktivis Islam ini, yang pernah mereka tindas dulu, dan sekaligus iri pada karier politiknya yang melejit bak meteor di partai mereka. Setelah bertahun-tahun lewat, Anwar Ibrahim terbukti merupakan aset berharga bagi Mahathir, seorang politisi UMNO yang setia dan menteri kabinet serta politisi yang efektif, yang berhasil membuyarkan tantangan PAS dan meraih dukungan dari kalangan minoritas non-Muslim Malaysia, terutama Cina.

Apa pun penilaian yang diberikan masyarakat kepada Anwar Ibrahim, ternyata harus diakui secara jujur bahwa gerakan politik Islam yang dilakukan Anwar Ibrahim bersama Mahathir Mohammad lewat UMNO cukup signifikan. Hak-hak istimewa Melayu dan Islam bisa diaktualisasikan dengan cara yang baik, sehingga tidak menimbulkan gejolak bagi non-Melayu dan non-Muslim. Ini juga sekaligus menjadi jawaban, bahwa bergabungnya Anwar Ibrahim ke UMNO adalah untuk mengaktualisasikan perjuangan politik Islam yang ia cita-citakan selama ini. Walaupun pada akhirnya Anwar Ibrahim juga terpental dari lingkaran kekuasaan setelah ia dicampakkan oleh Mahathir Mohammad karena persaingan politik.

Selanjutnya, komitmen awal perjuangan politik PAS adalah mendirikan negara Islam Malaysia yang berlandaskan syari'ah dengan memakai Al-Qura'an dan Sunnah Nabi sebagai landasan hukum. Hal ini sesuai dengan latar belakang sejarah Malaysia yang memiliki beberapa kerajaan dan telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidup masyarakatnya. Kerajaan-kerajaan Malaysia sudah ada jauh sebelum kolonial Inggris menjajah negeri ini. Kedudukan raja-raja Malaysia pun begitu erat dengan nilai-nilai Islam, karena selain sebagai pemimpin rakyat, raja juga adalah pemimpin agama. Inilah alasan utama PAS memperjuangkan syariat Islam, sehingga sangat logis kalau umat Islam memiliki hak-hak istimewa di negara yang memiliki keterkaitan sejarah yang kuat dengan Islam.

PAS cenderung mendukung penerapan hukum Islam tradisional atau klasik daripada mengakui, sebagaimana dilakukan ABIM, adanya kebutuhan untuk memperbaruinya. Lagi pula meskipun PAS menegaskan bahwa orang-orang non-Muslim tidak perlu takut akan berdirinya sebuah negara Islam. Sikapnya menyamakan Islam dengan nasionalisme Melayu, desakannya untuk mendapatkan hak istimewa bagi kaum Muslim Melayu, penola-

kan mentah-mentahnya terhadap nilai-nilai Barat, sekularisme, dan kebudayaan kuning, dan kecenderungannya untuk menganggap orang-orang Cina dan India sebagai ancaman bagi perkembangan dan kepentingan Melayu, telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai masa depan orang-orang non-Muslim di sebuah negara Islam yang didominasi PAS.⁹

Dalam konteks politik dan pengamalan Islam di Malaysia, kepemimpinan negara adalah bersifat moderat, dimana secara lazimnya sifat ini lebih memberikan perhatian kepada masa depan. Komitmen melaksanakan program Islamisasi yang dilakukan dengan kaedah pengislaman sedikit demi sedikit, bukannya dilakukan dengan cara drastis. Pemerintah Islam dalam konteks Malaysia berperan besar dalam menjayakan peningkatan dan kesadaran Islam di dalam pemerintahan sebuah negara. Ia juga menjadikan kebangkitan Islam di Malaysia berorientasikan Islam moderat yang didukung oleh pihak pemerintah sendiri.¹⁰

Hak-hak istimewa Melayu dan Islam di Malaysia sesungguhnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lewat proses yang panjang, bahkan sejak masa penjajahan Inggris. Adanya pengakuan serta simpati Inggris diberlakukan undang-undang yang membentuk Majlis-majlis agama Islam dan adat istiadat Melayu di beberapa negeri, seperti Selangor, Pahang, Kelantan, Trengganu, dan Perlis. Sedangkan di negeri-negeri lain, walaupun majlis-majlis agamanya tidak menyebut adat bersamanya, tetap mengakui otoritas adat sebagai sumber hukum. Lebih lanjut menurut Abdul Majeed Mohammed Mackeen menjelaskan:

Kenyataannya, peraturan negeri sering tidak menyentuh adat Melayu. Ini diartikan kaitan antara adat yang berlaku dan hukum syari'ah tidak lagi wujud dan pakar syari'ah yang terlibat cenderung tidak mengindahkan, sehingga seseorang dapat berkesimpulan, perkembangan positif bagi perluasan ajaran formal Islam dan meningkatnya kesadaran sebagai akibat kuatnya kesadaran Islam dalam masyarakat setempat.¹¹

Walaupun adat Melayu tidak disebut dalam peraturan di negeri tertentu, namun adat tersebut tetap dipakai. Bahkan walaupun adat Melayu

⁹John L Esposito & John o Voll, *Demokrasi.....*, h. 179

¹⁰Khadijah Md. Khid, *Politics in Malaysia: The Malay Dimension*, (London: Routledge, 2007), h. 57

¹¹Abdul Majeed Mohamed Mackeen, *Contemporary Islamic Legal Organization in Malaya*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1999), h. 51

tersebut bertentangan dengan Undang-undang Islam, masih juga diterima. Dalam teori, metodologi Undang-undang Islam melalui ijtihad, mengakui adanya penyesuaian dan mengenal sebagian adat istiadat setempat. Hanya dalam praktiknya, berbagai adat istiadat yang mampu bertahan di Malaysia sejak hukum Islam dikenalkan sebagiannya masih mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹²

Para aktivis mahasiswa juga ikut andil dalam memperjuangkan penguatan hak-hak istimewa Melayu dan Islam. Para mahasiswa atau pejabat universitas yang tidak setuju atau berusaha menghalangi tindakan mereka sering dikecam sebagai orang “kafir”. Sementara pendekatan kelompok Republik Islam menarik dukungan banyak orang, ia pun mengasingkan banyak kalangan lain. Meskipun mereka mendapatkan pengikut di kalangan mahasiswa dan fakultas, namun mereka tidak dapat menjadi organisasi yang penting di panggung politik nasional.¹³

Di negeri Sembilan misalnya, Undang-undang adat Melayu terus berkuasa dan kuat, walaupun berkonflik dengan Undang-undang Islam. Jabatan Agama Islam Negeri sembilan menyadari tentang pertentangan undang-undang tanah adat dengan hukum Islam, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa karena soal adat terletak di bawah kekuasaan badan keadilan Undang-undang. Namun yang lebih penting dari itu adalah bahwa kekuatan adat itu berlaku karena pucuk pimpinan negerinya sendiri menyatakan bahwa adat tidak bertentangan dengan Islam.¹⁴

Ketika Islam dan Melayu saat ini mendapatkan hak-hak istimewa sesungguhnya adalah bagian dari perjuangan panjang tokoh-tokoh Melayu dan Islam. Dalam hal ini PAS sebagai partai Islam yang dominan dengan massa Melayu wajar manakala ikut memperjuangkan hak-hak istimewa tersebut. Keberhasilan dalam memperjuangkan hak-hak istimewa tersebut tidak hanya kepentingan PAS, namun juga semua partai yang berbasis massa Melayu, termasuk UMNO sebagai partai penguasa. Perolehan hak-hak istimewa bagi etnis Melayu dan Islam juga didukung penuh oleh para raja

¹²Ismail Mat, *Adat and Islam in Malaysia: A Study in Legal Conflict and Resolution*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2000), h. 85

¹³Wawancara dengan Lukman (Pengurus UMNO) di Kuala Lumpur, tanggal 6 April 2010.

¹⁴Ahmad Ibrahim, *Sistem Undang-Undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), h. 44

yang sejak awal memiliki tanggung jawab besar pada eksistensi Melayu dan Islam.

C. Strategi Politik UMNO

Walaupun UMNO bukan partai Islam, namun kebijakan politik yang dibuat begitu banyak yang menguntungkan umat Islam. Apalagi pada masa rezim Mahathir Mohammad dan Abdullah Ahmad Badawi, Islamisasi kebijakan politik Malaysia cukup banyak yang dilakukan. Di masa rezim Mahathir Mohammad misalnya, ia mengajak aktivis Islam Anwar Ibrahim bergabung dengan UMNO, sehingga Anwar Ibrahim mendapat kesempatan untuk mengaktualisasikan perjuangan politik Islam lewat kekuasaan. Tidak hanya itu, pada rezim Mahathir juga berdiri bank Islam, asuransi Islam, dan Universitas Islam Internasional. Demikian pula pada rezim Abdullah Ahmad Badawi, kebijakan politik Islam tumbuh subur, mulai dari munculnya konsep Islam moderat lewat Islam Hadhari, yang bisa diterima oleh umat Islam pada umumnya, Islamisasi birokrasi pemerintahan hingga dukungan kuat pada aktivitas dakwah mulai dari tingkat desa hingga kerajaan.

Islamisasi politik Malaysia begitu gencar dilakukan, baik oleh UMNO maupun PAS, karena untuk meraih dukungan massa Melayu yang identik dengan Islam. UMNO dan PAS mengembangkan paradigma mereka sendiri. Islam di Malaysia semakin banyak mengadopsi warna lokal karena para sarjana yang terdidik di dunia Muslim dan Barat, menerapkan pengetahuan dan kecakapan mereka bukan hanya untuk menyampaikan tradisi pengetahuan Islam yang telah dikembangkan di Timur Tengah, melainkan juga mengembangkan tafsir serta penerapan Islam yang lebih menyatu dengan kondisi setempat, membuatnya dikemas dalam bahasa dan idiom lokal sehingga menjadi lebih relevan.¹⁵

Dikotomi Muslim-sekuler di dalam masyarakat Melayu dapat dilihat sebagai perluasan dan ekspansi perpecahan lama. Tetapi kali ini dikotomi di antara penganut Muslim yang taqwa yang telah mendapatkan dan mengerti totalitas Islam sebagai cara hidup, dengan bangsa Melayu sekuler yang kebarat-baratan yang prioritasnya pada modernisasi dan pembangunan serta melihat Islam tradisional sebagai satu kendala. Kelompok terakhir ini yang secara tradisional diwakili UMNO, selalu ingin menjaga pemisahan

¹⁵*Ibid*, h. 186

agama dan politik, khawatir bahwa penafsiran Islam yang sempit dan tradisional hanya akan menahan laju pembangunan ekonomi orang Melayu.¹⁶

Muslim di Malaysia dituntut mengikuti keputusan-keputusan Mahkamah Syariah ketika mereka berkenaan dengan agama mereka. Yurisdiksi Mahkamah Syariah dibatasi hanya bagi Muslim menyangkut keyakinan dan kewajiban sebagai Muslim, termasuk di antaranya pernikahan, warisan, kemurtadan, dan hubungan internal sesama umat. Tidak ada pelanggaran perdata atau pidana berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syariah, yang memiliki hierarki yang sama dengan Pengadilan Sipil Malaysia.

Meskipun menjadi pengadilan tertinggi di negara itu, pengadilan-pengadilan sipil (termasuk pengadilan persekutuan, pengadilan tertinggi di Malaysia) pada prinsipnya tidak dapat memberi putusan lebih tinggi dari pada yang dibuat oleh Mahkamah Syariah, dan biasanya mereka segan untuk memimpin kasus-kasus yang melibatkan Islam di dalam wilayah atau pertanyaan atau tantangan terhadap otoritas Mahkamah Syariah. Hal ini menyebabkan masalah-masalah yang cukup mengemuka, khususnya yang melibatkan kasus-kasus perdata di antara Muslim dan non-Muslim, di mana pengadilan sipil telah memerintahkan non-Muslim untuk mencari pertolongan dari Mahkamah Syariah.¹⁷

Kecenderungan pemerintah Mahathir yang semakin meningkat pada Islam telah menjadi penyebab keprihatinan kelompok-kelompok minoritas. Tekanan yang lebih besar pada kesadaran Melayu-Islam dan identitas serta peranan Islam yang semakin luas dalam kehidupan publik sering mengganggu keseimbangan komunal yang rentan. Sementara sebagian orang menyatakan bahwa Islamisasi di Malaysia hanyalah bersifat permukaan dan simbolisme tanpa isi, hal itu tetap menyebabkan kekhawatiran di kalangan non-Muslim. Dengan demikian menimbulkan tantangan bagi pembangunan bangsa di kalangan penduduk Malaysia yang heterogen.¹⁸

Mengenai keinginan PAS untuk menerapkan syariat Islam, dan terutama *hudud*, Mahathir menyatakan bahwa Undang-undang Malaysia sudah sesuai dengan Islam, dan dia menegaskan kembali nilai-nilai pluralisme dan toleransi, serta memberi peringatan terhadap ekstrimisme agama. Pada saat

¹⁶Zainah Anwar, *Kebangkitan Islam di Malaysia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 106

¹⁷Shaharuddin Badarudin, *Demokrasi dan Prose s...*, h. 22

¹⁸John L Esposito & John O Voll, *Demokrasi ...*, h. 201

yang sama, pemerintah terus mendukung pemahaman yang positif dan reformis terhadap Islam, menggambarkan Islam sebagai sebuah agama yang dinamis dengan etika kerja yang kuat, untuk mendukung pendekatan Malaysia yang agresif dalam bisnis dan industrialisasi.

Proses Islamisasi dan juga pendekatan politik Islam, pemikiran dan ide serta strategi kepemimpinan adalah penting dalam menyusun proses Islamisasi. Aspek pemikiran kepemimpinan adalah diantara yang terpenting untuk menjayakan pembinaan dasar dan pendekatan Islam dalam politik sebuah negara. Politik Islam masih kekal sebagai penentu yang kuat dalam negara seperti Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara Islam yang menjadi contoh dalam melaksanakan proses Islamisasi dan berjaya mengaplikasikan Islam disamping kekal sebagai sebuah negara yang menghormati hak berpolitik semua warga negara yang berkonsepkan demokrasi.¹⁹

Konstitusi Malaysia secara teoritik menjamin kebebasan beragama bagi warga negara. Dalam konstitusi tersebut juga disebutkan, bahwa semua non-Muslim yang menikahi Muslim harus meninggalkan agama mereka dan beralih kepada Islam. Selain itu, kaum non-Muslim juga mengalami berbagai batasan di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, seperti pembangunan sarana ibadah dan perayaan upacara keagamaan di beberapa negara bagian.²⁰

Muslim di Malaysia dituntut mengikuti keputusan-keputusan Mahkamah Syariah ketika mereka berkenaan dengan agama mereka. Yurisdiksi Mahkamah Syariah dibatasi hanya bagi Muslim menyangkut keyakinan dan kewajiban sebagai Muslim, termasuk di antaranya pernikahan, warisan, kemurtadan, dan hubungan internal sesama umat. Tidak ada peraturan perdata atau pidana berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syariah, yang memiliki hierarki yang sama dengan Pengadilan Sipil Malaysia. Meskipun menjadi pengadilan tertinggi di negara itu, pengadilan-pengadilan sipil (termasuk pengadilan persekutuan, pengadilan tertinggi di Malaysia) pada prinsipnya tidak dapat memberi putusan lebih tinggi dari pada yang dibuat oleh Mahkamah Syariah.²¹

¹⁹Mohammad Abu Bakar, *Generasi Muda dan Kesadaran Islam: Konflik dan Integrasi Dalam Masyarakat Melayu*, (Kuala Lumpur: Suluh Ilmu, 2000), h. 27

²⁰Shaharuddin Badarudin, *Demokrasi dan Proses ...*, h. 23

²¹*Ibid*, h. 19

PAS sangat jelas mengungkapkan cita-citanya untuk menerapkan Islamisasi masyarakat (dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial). Ia menerima sistem pemerintahan parlementer dan berpartisipasi dalam pemilihan umum, namun mengecam kontrol pemerintah yang dipimpin UMNO. Agak mirip dengan Iran, PAS mendukung dibentuknya suatu dewan ulama yang akan memastikan bahwa semua Undang-undang sesuai dengan Islam. Ia menyerukan Islamisasi dalam kurikulum pendidikan, dan menganjurkan pemberian mata pelajaran agama yang lebih banyak ditambah pelbagai mata pelajaran modern sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²²

Secara konstitusional, Islam menikmati status resmi sebagai agama negara Federasi Malaysia, walaupun praktek agama-agama lain juga dijamin oleh Undang-undang. Sebenarnya jumlah penduduk Malaysia yang bergama Islam hanyalah separuh lebih sedikit dari jumlah penduduk, walaupun Islam nampak di mana-mana, sebabnya adalah karena faktor sejarah dan juga politik Malaysia yang begitu dominan dengan sultan-sultan yang identik dengan pemimpin Islam.

Secara politik, peran Islam bahkan lebih penting lagi. Islam telah menjadi bukan saja sebagai faktor penyatu bagi orang-orang Melayu, tapi muncul sebagai ungkapan umum bagi identitas politik Melayu. Evolusi politik negara-negara Melayu tradisional tergantung pada Islam sebagai wahana penting bagi perubahan dan stabilitas. Terbukanya negara-negara tradisional Melayu bagi dunia dan sekitarnya, pada dasarnya juga lewat hubungan diplomatik, perdagangan dan keagamaan dengan negara-negara Muslim sezaman di wilayah itu atau di luarnya. Negara-negara Melayu tradisional menjadi anggota masyarakat internasional, pada dasarnya melalui Islam. Juga Islam menjadi ramuan bagi resistensi anti kolonial orang-orang Melayu.

Reaksi Melayu terhadap serikat Melayu didukung secara aktif, terutama pada lapisan masyarakat bawah, oleh ulama Melayu tradisional. Partai-partai politik Melayu selalu mengklaim mendukung cita-cita Islam, yang tanpa klaim itu mereka tidak mungkin tetap bertahan. Secara elektoral, politis ataupun ideologis, Islam tetap suatu faktor yang tidak dapat diabaikan partai politik manapun yang berbasis kaum Muslim ataupun tidak.

²²John L Esposito & John O Voll, *Demokrasi ...*, h. 178

Politik demokratis ternyata telah memperkuat peran Islam sebagai suatu faktor penting dalam politik tingkat lokal maupun nasional.²³

Kebijakan Islami pemerintah pada gilirannya kemudian melahirkan seluruh tingkat kegiatan yang mengkonsolidasi kehadiran Islam lebih jauh dalam negara Malaysia. Ada bukti-bukti nyata dari Islamisasi yang digerakkan pemerintah. Diantaranya, pembentukan Bank Islam, sistenm asuransi Islam, Universitas Islam Internasional, penyempurnaan administrasi keagamaan Islam dan pengadilan syari'ah, diberlakukannya peraturan dan Undang-undang yang sangat mencerminkan ajaran-ajaran Islam, membiayai dialog-dialog regular, seminar-seminar, lokakarya yang melibatkan para pemimpin-pemimpin Islam pada semua tingkat, termasuk diantaranya pelaksana pemerintah, partisipasi pemerintah lebih aktif dalam gerakan-gerakan Islam internasional, seperti OKI, IDB, semua ini menaikkan citra Islam.

Islamisasi di Malaysia menjadi jauh lebih kuat ketika sektor-sektor non-pemerintah juga terlibat. Gerakan-gerakan Islam yang beragam telah menjamur pada tingkat formal maupun non-formal untuk mencapai tujuan Islam dalam cara dan gaya mereka sendiri-sendiri. Gerakan-gerakan atau lebih tepatnya kegiatan-kegiatan tabligh mendorong usaha untuk membangkitkan komitmen ke-Islaman yang sebenarnya telah tertanam pada diri mereka. Walaupun gerakan-gerakan itu tidak monolitik, melainkan pada dasarnya adalah a-politik, kondisi ini mungkin ia merupakan wadah yang paling penting. Lewat gerakan-gerakan ini, ungkapan ukhuwah Islamiyah terus diperbaharui kembali di seluruh negeri. Gerakan-gerakan sufi atau tarekat juga merupakan sumber yang vital bagi revitalisasi Islam di Malaysia.²⁴

Organisasi-organisasi Muslim yang lain pada dasarnya cenderung lebih politis, berusaha mempengaruhi keputusan-keputusan politik di negeri itu agar mengarah pada realisasi cita-cita negara Islam sebagaimana mereka definisikan. Partai Islam khususnya berusaha mendirikan negara Islam di Malaysia, yang dapat memperhatikan kepentingan-kepentingan semua warganya yang Muslim maupun non-Muslim. PAS dan ABIM misalnya melakukan usaha-usaha bersama untuk memberikan gambaran terbaik

²³*Ibid*, h. 284

²⁴*Ibid*, h. 284

tentang Islam untuk mengoreksi prasangka yang ada tentang Islam, apakah itu dari non-Muslim atau pun dari kaum Muslim sendiri.²⁵

D. Penguatan Dakwah

Malaysia sebagai salah satu negara merdeka, sebelum penjajahan Barat telah hidup sebagai kerajaan Islam. Berbeda dengan Indonesia, hampir seluruh semenanjung Melayu (Malaysia bagian Barat), sejak dahulu memang telah berdiri kesultanan yang mempunyai undang-undang dasar Islam, dimana hukum yang berlaku ketika itu diturunkan dari nilai-nilai syari'ah Islam. Konstitusi kesultanan Selangor misalnya, menyatakan bahwa kerajaan itu berdasarkan syari'at Islam, beraliran *ahli sunnah wal jama'ah*, dan bermazhab Syafi'i. Nilai-nilai syari'ah Islam ini bahkan sudah sempat dilakukan menjadi undang-undang kerajaan.²⁶

Sultan sebagai kepala agama, mempunyai wewenang penuh di dalam mengatur segala aktivitas keagamaan. Hal ini dari berbagai segi merupakan satu rahmat Allah bagi umat Islam di Malaysia. Misalnya, kehidupan para muballigh, para ustadz, beserta imam-imam masjid lebih terjamin kehidupannya dibanding dengan rekan-rekan mereka di Indonesia. Para imam masjid merupakan pegawai kerajaan, yang karena itu kesejahteraan dan wibawa mereka di tengah-tengah masyarakat sudah terpelihara. Di sisi lain, untuk memberikan khutbah atau dakwah di Malaysia, terutama di masjid-masjid, seseorang harus mempunyai sertifikat. Hal ini merupakan benteng yang memelihara iman umat dari pengaruh misi agama lain yang akan memurtadkan mereka. Kehidupan beragama di Malaysia terasa sangat formal. Khutbah jum'at harus berisikan do'a bagi sultan dan seluruh keluarganya.²⁷

Selain aktivitas dakwah yang begitu baik di Malaysia, pendidikan Islam juga sudah berjalan cukup lama walaupun dengan metode tradisional dengan model pesantren. Namun dalam perkembangan berikutnya, seiring dengan masuknya penjajah Barat ke Malaysia, proses sekularisasi pendidikan tidak bisa dihindari yang dipelopori oleh orang-orang Kristen, bukan atas inisiatif kerajaan kolonial. Jadi proses sekularisasi berjalan serentak

²⁵*Ibid*, h. 285

²⁶Zainah Anwar, *Kebangkitan Islam ...*, h. 12

²⁷*Ibid*, h. 12

dengan proses kristenisasi. Sekolah-sekolah pertama yang didirikan para misionaris ini ialah sekolah Inggris, yang mempunyai dua jenis pula, yaitu; *Pertama*, ialah *free schools* yang mendapat bantuan penuh, dan yang *kedua*, ialah *mission schools*, yang didirikan dan dibiayai oleh para *missionaris* dengan bantuan kerajaan. Sekolah-sekolah *missionaris* atau setengah bantuan ini kebanyakan didirikan dan dibiayai persatuan London, kumpulan Roma Katolik. Tujuan dari gerakan *missionaris* ini menyemaikan asas-asas ajaran Kristen melalui pelajaran-pelajarannya.²⁸

Dalam pembangunan sekolah-sekolah Inggris yang berkembang di negeri-negeri Melayu, yang mengambil peranan utama adalah kerajaan kolonial sendiri. Dalam konteks ini, politik Inggris dalam pendirian sekolah-sekolah ini berdasarkan model England, yang bertujuan menjamin kedudukan kaum penjajah melalui pendidikan golongan elit Melayu tradisional. Untuk keperluan tersebut sekolah pertama ialah “Sekolah Raja” di selangor pada tahun 1890, kemudian ditutup dan digantikan dengan *Victoria Institution* pada tahun 1893.²⁹

Ciri utama dasar sekularisme pendidikan yang ada ialah sifat dualismenya, yaitu pemisahan antara pendidikan agama dengan kajian akademik, seperti yang dikenal dengan istilah “*religious knowledge*” dan “*secular knowledge*”. Prinsip inilah yang dijalankan di sekolah-sekolah Inggris dan sekolah-sekolah Melayu. Di samping memberikan pelajaran Melayu pagi harinya, juga disajikan pelajaran al-Qur’ān. Kemudian pelajaran al-Qur’ān dihapuskan Inggris, tetapi tindakan ini sudah menyemaikan benih-benih dualisme sistem pendidikan di tanah Melayu.³⁰

Setelah merdeka, sekularisme dan penerapan dualisme pendidikan tidak terhapus, bahkan tetap memainkan peranan seperti sebelumnya. Mata pelajaran sekular bertambah seiring dengan pertambahan institusi pendidikan itu sendiri. Menurut Faisal Othman, walau bagaimana pun, sistem pendidikan Malaysia, seperti dalam kasus semua negara Islam, masih tetap berdasarkan sistem pendidikan sekular. Prinsip pengetahuan yang telah diintegrasikan atau disatukan berdasarkan pada prinsip *Tauhid Islam* masih

²⁸Abdul Rahman Haji Abdullah, *Penjajahan Malaysia Cabaran dan Warisannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 24

²⁹*Ibid*, h. 25

³⁰*Ibid*, h. 27

jauh di luar imjinasi sebagian besar pendidik.³¹

Ada perbedaan strategi politik Islam yang menonjol antara Mahathir Mohammad dengan Anwar Ibrahim, khususnya dalam aktualisasi dakwah dan pembelaan pada dunia Islam. Jika Anwar Ibrahim agak melembutkan profil Islamnya, Mahathir tampaknya lebih suka menonjolkan profil Islam dan profil Malaysia di kawasan Asia Tenggara, dunia Muslim, dan komunitas internasional yang lebih luas. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa Mahathir telah lama menjadi pengecam terbuka terhadap Barat, baik kolonialisme Eropa, maupun neoimperialisme Barat modern, serta dukungan Barat bagi Israel. Hubungannya dengan Inggris dan Amerika Serikat, meskipun secara umum baik, namun pernah mengalami ketegangan dalam sejumlah peristiwa.

Kritik yang dilontarkan Mahathir pada Barat yang dinilai berlaku tidak adil pada dunia Islam sesungguhnya beralasan, jujur dan obyektif. Bahkan ketika berpidato mengenai tata dunia baru di PBB, Mahathir dengan tegas mengatakan: “yang sesungguhnya terjadi sekarang ini hampir sama dengan imperialisme kolonial abad kesembilan belas, yaitu yang besar adalah yang benar. Kekuatan-kekuatan besar itu masih ada, mengacung-acungkan tongkat mereka yang berat di depan wajah bangsa-bangsa yang lebih kecil demi membela kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan sesuatu yang sesungguhnya benar dan adil. Semoga anggota PBB harus berpartisipasi dalam menciptakan tata dunia baru jika kita ingin menghindari kolonialisme baru”.

Keberanian Mahathir melakukan kritik terhadap imperialisme Barat, baik di masa lalu maupun masa kini, dan kepeduliannya pada tata dunia baru, bukan semata-mata ungkapan kontemporer mengenai hegemoni Barat yang berkaitan dengan pendirian mengenai demokrasi. Jadi, sementara dia menegaskan bahwa demokrasi, dan hanya demokrasi yang sah dan dapat diterima sekarang. Pemerintah Malaysia, seperti yang tercermin dalam pernyataan-pernyataan perdana menteri dan wakil perdana menternya, telah memperingatkan tentang bahaya-bahaya yang mengancam dari pihak-pihak yang tidak hanya menggurui, tetapi juga berusaha memaksakan tafsir mereka mengenai demokrasi.

³¹Awang Had Saleh, *Pendidikan ke Arah Perpaduan: Sebuah Perspektif Sejarah*, (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1990), h. 66

Mahathir telah mengganti pandangan tradisional Malaysia yang pro Barat dengan kebijakan “berpaling ke Timur” yang menekankan orientasi Selatan-Selatan dan bukannya Utara-Selatan. Kebijakan Malaysia “berpaling ke Timur” yang berjangkauan nasional dan regional, didorong oleh kritiknya terhadap Barat dan tekanannya pada nilai-nilai asli Asia dan nilai-nilai Islam sehingga dapat memperkuat komunitas Muslim Melayu dan perkembangan Malaysia sendiri.³²

Terhadap mereka yang berbeda agama ini pun pergaulan duniawi yang baik harus tetap dijaga, dan di sini berlaku adigum, “bagimu agamamu dan bagiku agamaku”. Ungkapan ini bukanlah pernyataan yang tanpa peduli dan rasa putus asa, melainkan karena kesadaran bahwa agama tidak dapat dipaksakan, dan bahwa setiap orang, lepas dari soal agamanya apa, tetap harus dihormati sebagai manusia sesama makhluk Tuhan.³³

Kritik pemerintah Malaysia terhadap nilai-nilai Barat dan tindakannya menjauhkan diri dari Barat dengan kebijakan “berpaling ke Timur” serta tekanannya pada nilai-nilai bumi puta mempunyai implikasi regional. Pembicaraan pemerintah mengenai nilai-nilai Asia telah menekankan nilai-nilai Cina dan Islam secara khusus. Pada 1995, sebuah konferensi Internasional diselenggarakan di Universitas Malaya mengenai nilai-nilai Konfusius dan Islam yang berhasil menarik perhatian lebih dari seribu peserta.³⁴

Bagaimanapun kuatnya pendekatan yang bersifat lebih membumi dan regional yang dilakukan pemerintah Malaysia, namun ada potensi kelemahan berkaitan dengan isu-isu pluralisme, identitas, dan demokratisasi. Dalam kenyataannya, kebanyakan pemimpin dan organisasi utamanya adalah Muslim, kebanyakan di antara mereka adalah mantan para ketua dan aktivis pemuda Islam yang kini telah tiga puluhan dan empat puluhan dan telah menduduki jabatan pemimpin. Sekeras apa pun usaha mereka untuk membangun pemahaman pluralistis mengenai kebudayaan dan nilai-nilai Asia, orang-orang non-Muslim, terutama etnik Cina di Malaysia, yang telah lama dianggap oleh kebanyakan kaum Muslim Melayu sebagai kelompok mino-

³²*Ibid*, h. 191

³³Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), h. 92

³⁴*Ibid*, h. 194

ritas dan elite ekonomi yang dominan, selalu ada saling curiga.³⁵

Meskipun orang-orang non-Muslim diberi rasa aman dengan tafsir Islam yang menekankan pluralisme, keselarasan, moderai, dan toleransi, upaya memadukan nilai-nilai spiritual dengan industrialisasi dan kemajuan material tetap mengandung resiko-resikonya sendiri. Kaum non-Muslim maupun kaum Muslim yang lebih konservatif mungkin punya alasan ihwal keprihatinan mereka. Banyak kaum non-Muslim yang mungkin tetap khawatir bahwa tekanan pada nilai-nilai spiritual akan memberikan hak istimewa pada Islam dan nilai-nilai Islam serta pengikisan tradisi-tradisi pluralis Malaysia. Kaum Muslim konservatif, terutama para ulama konservatif, mungkin menganggap berkelindannya agama dengan kemajuan material sebagai sesuatu yang dapat lebih jauh mengikis inti spiritualitas Islam.³⁶

PAS senantiasa dikaitkan dengan partai dakwah yang memperjuangkan Negara Islam, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat. Oleh sebab itu ia menjadi satu-satunya partai yang mempunyai Dewan Ulama. Latar belakang pendiriannya juga lebih banyak dikaitkan dengan cita-cita bagi mewujudkan sebuah organisasi politik Islam yang unggul. Bahkan dalam kampanye, sering disampaikan oleh tokoh-tokoh PAS kepada mereka yang memilih PAS akan mendapat pahala dari Allah SWT, karena perjuangan luhur PAS yang menegakkan dakwah Islam lewat perjuangan mendirikan negara Islam. Apabila ada pihak lain terutama UMNO, yang mempersoalkan kesungguhan PAS dalam memperjuangkan negara Islam, maka mereka akan memberi perlawanan yang sangat keras.

Dalam pandangan politik PAS, terhadap mereka yang berbeda agama pun, pergaulan duniawi yang baik harus tetap dijaga, dan di sini berlaku adigum, "bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Ungkapan ini bukanlah pernyataan yang tanpa peduli dan rasa putus asa, melainkan karena kesadaran bahwa agama tidak dapat dipaksakan, dan bahwa setiap orang, lepas dari soal agamanya apa, tetap harus dihormati sebagai manusia sesama makhluk Tuhan. Praktik politik dengan menghargai perbedaan agama juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.³⁷

³⁵*Ibid*, h. 195

³⁶*Ibid*, h. 196

³⁷Nurcholis Madjid, *Islam ...*, h. 92

Perjuangan politik PAS dalam bidang dakwah ini mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Apalagi ABIM sebagai organisasi dakwah di kalangan mahasiswa memberi dukungan kuat. Perkembangan ABIM dan PAS menunjukkan sejauh mana keyakinan agama dan realitas sosio-politik mempengaruhi susunan, ideologi, dan aktivitas politik organisasi-organisasi Islam, juga konfigurasi dan nasib mereka yang berubah-ubah. Ideologi dan politik ABIM yang lebih modernis banyak dipengaruhi oleh para pemimpinnya yang berpendidikan dan basis dukungannya yang berasal dari wilayah perkotaan. Sementara pendekatan PAS yang lebih konservatif mencerminkan basis pendukung yang lebih banyak berasal dari wilayah pedesaan dan dipimpin oleh para ulama Islam tradisional.

Di Universitas Malaya, gerakan dakwah dapat dibagi secara longgar ke dalam empat kelompok, yaitu: kelompok Republik Islam, Darul Aqam, Jamaat Tabligh, dan ABIM. Yang terbesar dan paling berpengaruh adalah kelompok Republik Islam, yang yakin akan tegaknya Republik Islam di Malaysia. Para mahasiswa menyangkal diberi cap sebagai kelompok Republik Islam, karena mereka hanya ingin menjadi Muslim sejati.³⁸

E. Kesimpulan

Secara politik, peran Islam dan Melayu sangat kuat di Malaysia. Islam telah menjadi faktor penting dalam mewarnai politik Malaysia, dan sekaligus sebagai faktor penyatu bagi orang-orang Melayu. Muncul ungkapan yang sudah umum di Malaysia, bahwa Islam adalah Melayu, dan Melayu adalah Islam. Evolusi politik negar-negara Melayu tradisional tergantung pada Islam sebagai wahana penting bagi perubahan dan stabilitas. Terbukanya negara-negara tradisional Melayu bagi dunia dan sekitarnya, pada dasarnya juga lewat hubungan diplomatik, perdagangan dan keagamaan dengan negara-negara Muslim sezaman di wilayah itu atau di luarnya. Negara-negara Melayu tradisional menjadi anggota masyarakat internasional, pada dasarnya melalui Islam. Juga Islam menjadi ramuan bagi resistensi anti kolonial orang-orang Melayu. Reaksi Melayu terhadap serikat Melayu didukung secara aktif, terutama pada lapisan masyarakat bawah, oleh ulama Melayu tradisional. Partai-partai politik Melayu selalu mengklaim mendukung cita-cita Islam, yang tanpa klaim itu mereka tidak

³⁸Zainah Anwar, *Kebangkitan Islam ...*, h. 42-43

mungkin tetap bertahan. Secara elektoral, politis ataupun ideologis, Islam tetap suatu faktor yang tidak dapat diabaikan partai politik manapun yang berbasis kaum Muslim ataupun tidak. Politik demokratis ternyata telah memperkuat peran Islam sebagai suatu faktor penting dalam politik tingkat lokal maupun nasional.

Kebijakan Islami pemerintah pada gilirannya kemudian melahirkan seluruh tingkat kegiatan yang mengkonsolidasi kehadiran Islam lebih jauh dalam negara Malaysia. Ada bukti-bukti nyata dari Islamisasi yang digerakkan pemerintah. Diantaranya, pembentukan Bank Islam, sistenm asuransi Islam, Universitas Islam Internasional, penyempurnaan administrasi keagamaan Islam dan pengadilan syari'ah, diberlakukannya peraturan dan Undang-undang yang sangat mencerminkan ajaran-ajaran Islam, membiayai dialog-dialog regular, seminar-seminar, lokakarya yang melibatkan pemimpin-pemimpin Islam pada semua tingkat, termasuk pelaksana pemerintah, partisipasi pemerintah lebih aktif dalam gerakan- gerakan Islam internasional, seperti OKI, IDB, semua ini menaikkan citra Islam.

Islamisasi di Malaysia menjadi jauh lebih kuat ketika sektor-sektor non-pemerintah juga terlibat. Gerakan-gerakan Islam yang beragam telah menjamur pada tingkat formal maupun non-formal untuk mencapai tujuan Islam dalam cara dan gaya mereka sendiri-sendiri. Gerakan-gerakan atau lebih tepatnya kegiatan-kegiatan tabligh mendorong usaha untuk membangkitkan komitmen ke-Islaman yang sebenarnya telah tertanam pada diri mereka. Walaupun gerakan-gerakan itu tidak monolitik dan pada dasarnya a-politik, mungkin ia merupakan wadah yang paling penting. Lewat gerakan-gerakan ini ungkapan ukhuwah Islamiyah terus diperbaharui kembali di seluruh negeri. Gerakan-gerakan sufi atau tarekat juga merupakan sumber yang vital bagi revitalisasi Islam di Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Madjeed Mohammed Mackeen, *Contemporary Islamic Legal Organization in Malaya*, Kuala Lumpur: University Malaya, 1999.
- Abdul Rahman Haji Abdullah, *Penjajahan Malaysia Cabaran dan Warisannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- , *Pemikiran Islam di Malaysia Sejarah dan Aliran*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Abdul Rahman Haji Ismail dkk, *Nasionalisme dan Revolusi di Malaysia pengamatan Sejarah*, Pulau Pinang: University Sains Malaysia, 2008.
- Ahmad Ibrahim, *Sistem Undang-undang di Malaysia*, Kuala Lumpur: DBP, 1990.
- , *Islam and The Constitution*, Kuala Lumpur: University Malaya Press, 1987.
- Anwar Ibrahim, *Renaissans Asia Gelombang Reformasi di Ambang Alaf Baru*, Bandung: Mizan, 1998.
- Edward Mortimer, *The Politics of Islam*, New York: Random House, Inc, 1986.
- George Mc Turnan Kahin, *Governments and politics of Southeast Asia*, Itaca and London: Cornell University Press, 1964.
- Hadi Awang, *Hadharah Islamiyah bukan Islam Hadhari*, Kuala Lumpur: Nufair Sdn, 2006.
- Harold Crouch, *Government & Society in Malaysia*, United States: Cornell University Press, 1996.
- Hussin Mutholib, *Islam and Ethnicity in Malay Politics*, Kuala Lumpur: University Malaya Press, 1990.
- Ibrahim Saad, *Pendidikan dan Politik di Malaysia*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1990.
- Ismail Mat, *Adat and Islam in Malaysia: A Study in Legal Conflict and Resolution*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2000.
- J.M. Gillick, *Sistem Politik Bumiputra Tanah Melayu*, Kuala Lumpur: DBP, 1992.
- Joel S Kahn and Francis Loh Kok Wah, *Fragmented Vision Culture and Politics in Contemporary Malaysia*, Sydney: Allen and Unwin Pty Ltd, 1992.

- John L Esposito & John O Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, Bandung: Mizan, 1999.
- Khadijah Md. Khalid, *Politics in Malaysia: The Malay Dimension*, London: Routledge, 2007.
- Mahathir Mohammad, *Islam and the Muslim Ummah*, Malaysia: Pelanduk Publications, 2003
- Mohammad Abu Bakar, *Generasi Muda dan Kesadarann Islam: Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Melayu*, Kuala Lumpur: Suluh Ilmu, 2000.
- Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- Robert W. Hefner, *The Politics of Multiculturalism Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, Honolulu: University of Hawai Press, 2001.
- Shaharuddin Badarudin, *Demokrasi dan Proses Politik di Malaysia*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2008.
- Shanti Nair, *Islam in Malaysia Foreign Policy*, London: Routledge, 1997.
- Zainah Anwar, *Kebangkitan Islam di Malaysia*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- , *Islamic Revivalisms in Malaysia: Dakwah Among the Students*, Selangor: Pelanduk Publications, 1987.